

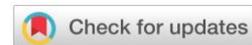
Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam dan Gerakan Pemikiran: Islam Madzhab Ciputat dan Himpunan Mahasiswa Islam

Samudra Eka Cipta* dan Taufan Sopyan Riyadi

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Corresponding email: samudra.eka@student.upi.edu

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3448>



ABSTRACT

Kata Kunci:
Islam; HMI;
Gerakan
Pemikiran;
Madzhab
Ciputat; Tradisi
Keilmuan

The 1980s became an important beginning in the history of the Islamic Student Movement in Indonesia. It is known as the beginning of the rise of thought among academics and IAIN Jakarta became the epicenter of the development of the Islamic thought movement. Many prominent scholars such as Azyumardi Azra, Harun Nasution, Nurcholis Madjid, and other figures were mobilized to become known as the Islamic School of Ciputat. The method used is historical and literature studies. This research concludes that the Ciputat School is not a school or a belief but rather a reforming movement of Islamic thought among Muslim academics which is inseparable from the existence of the HMI in the past.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
16/04/2020
Revised:
24/05/2020
Published:
29/06/2020

Periode 1980an menjadi awal penting dalam sejarah Gerakan Mahasiswa Islam di Indonesia. Periode tersebut dikenal sebagai awal kebangkitan pemikiran di kalangan akademisi dan IAIN Jakarta menjadi episentrum dari perkembangan pergerakan pemikiran Islam. Banyak cendekiawan-cendekiawan terkemuka seperti Azyumardi Azra, Harun Nasution, Nurcholis Madjid dan beberapa tokoh lainnya merupakan penggerak hingga dikenal dengan Islam Madzhab Ciputat. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dan studi literatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Madzhab Ciputat bukanlah sebuah aliran atau kepercayaan melainkan merupakan gerakan pembaharu pemikiran Keislaman di kalangan akademisi muslim yang tidak terpisahkan dengan eksistensi HMI di masa lalu.

PENDAHULUAN

Perkembangan politik selama kurun waktu 1970-1980 seringkali memunculkan gejala politik membawa pengaruh bagi kalangan akademisi. Kalangan akademisi melakukan pembaharuan pada gagasan sebagai upaya untuk memajukan cara berpikir mereka terkait realitas yang ada. Dalam bidang keislaman mereka kemudian mendirikan madzhab-madzhab yang berusaha memodernisasikan cara pandang umat Islam dalam memahami ajaran Islam baik secara kontekstual maupun konseptual (Gayatri et al., 2009).

Kebijakan Pemerintah Orde Baru terkait dengan penerapan politik azas tunggal Pancasila telah memberikan warna baru sekaligus tantangan bagi Umat Islam dalam melaksanakan partisipasi umat Islam di dunia politik. Penerapan Azas Tunggal Pancasila disebabkan karena buntut panjang dari kasus yang terjadi di Indonesia mulai dari peristiwa G30 September 1965 hingga peristiwa Woyla dan konflik antara Massa pendukung PPP dengan Golkar menjadikan alasan diterapkannya kebijakan tersebut. Kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra terhadap pelaksanaannya. Ketua PBNU saat itu, As'ad Syamsul Arifin menanyakan langsung kepada Soeharto terkait bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan tersebut (Makin, 2016). Bahkan dalam internal HMI terjadi pertentangan dan terpecah menjadi HMI MPO (Majelis Penyelamatan Organisasi) dan HMI DIPO yang menjadikan HMI sebagai pola ideologi kekuatan baru. Pemerintah Orde Baru juga menerapkan P4 (Program Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) sebagai kekuatan baru dalam upaya deislamisasi pada bidang pendidikan (Khotimah, 2009). Sebagai contoh pengadaan Buku Teks Sejarah Nasional Indonesia yang mana materi yang diajarkannya hanya mengajarkan tentang nasionalisme versi baru dan lebih mementingkan kepentingan Orde Baru dalam historiografi Indonesia hanya sedikit yang memunculkan peran sosok tokoh-tokoh Islam maupun organisasi-organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, maupun Persis. Bouchier (2014) mengatakan bahwa penerapan P4 pada dasarnya hanya merupakan instruksi pemerintah Orde Baru kepada Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Menariknya adalah ketika diberlakukannya P4 merupakan bentuk kebijakan yang mengajarkan cara budaya sopan santun sebagai gambaran budaya Orang Jawa.

IAIN sebagai salah satu institusi pendidikan muslim terbesar saat itu berusaha untuk melakukan pembaharu pemikiran dengan adanya upaya modernisasi pemikiran Islam sebagai buntut atau dampak yang dihasilkan dari kebijakan Masa Orde Baru. Banyak kemudian tokoh-tokoh dari IAIN memperkenalkan gagasan mengenai modernisasi pada bidang pendidikan Islam maupun secara doktrin yang sifatnya kontekstual. Madzhab tersebut dikenal dengan Madzhab Islam Ciputat.

HMI sebagai massa kekuatan politik kampus saat itu menerima Madzhab Ciputat sebagai pusat gerakan kemahasiswaan. HMI menganggap sebagai bentuk kekuatan politik mengingat terjadinya haluan HMI yang lebih mengnginkan pada bidang politik praktis karena dianggap sebagai sesuatu yang menjanjikan ketimbang nilai-nilai tradisi keislaman dan nilai-nilai keilmuan keislaman. Nilai Dasar Perjuangan tentunya memiliki keterkaitan antara HMI dengan Madzhab Ciputat yang saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yang sama-sama menginginkan cara berpikir yang moderat sebagai upaya untuk menghindari cara berpikir sempit yang akan berujung pada budaya takfiri (yakni budaya saling mengkafirkan satu dengan lainnya) yang merupakan sesuatu yang tidak diajarkan dalam Islam.

Kerangka teori yang dikembangkan pada penelitian ini yakni: madzhab dan pergerakan. *Pertama*, madzhab secara bahasa *mahalludz dizhab*. Ada juga itu di *Mu'jamul Lughah, Mu'jam fil Musthalahat wal Furuq al-Lughawiyah, Al-Kafawi* namanya. Madzhab dibagi menjadi tiga yakni madzhab sebagai keyakinan, sebagai aturan keislaman, dan sebagai metode. Ketiga pengertian tersebut saling ketergantungan satu sama lainnya. Madzhab sebagai keyakinan adalah madzhab yang diyakini secara menyeluruh termasuk pada doktrin dan tradisi yang dilakukan oleh para imam terdahulu. Madzhab sebagai aturan keislaman menyangkut pada masalah fiqh terkait penginterpretasian kepada suatu ajaran islam. Sedangkan madzhab sebagai metode yakni cara memahami terhadap maksud atau inti ajaran yang disampaikan berdasarkan pada pemahaman imam ([Chambert-Loir, 2011](#)).

Kedua, mengenai pergerakan yang diketahui sebagai pola atau alur dinamis dan berdampak pada masyarakat. Dalam sejarah Indonesia gerakan pemuda sebagai pihak kritis dalam menentang kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Diawali dengan masa Kemerdekaan Indonesia yang mana terjadinya perbedaan pandangan antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda yang kala itu dipimpin oleh Sjahrir menghendaki agar kemerdekaan Indonesia segera untuk dilakukan sedangkan golongan tua hanya menunggu persetujuan Jepang. Di Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia para golongan pemuda mendirikan Tentara Pelajar sebagai kekuatan militer di kalangan anak muda dalam menghadapi Agresi Militer Belanda. Kemudian dilanjut menjelang Masa Orde Baru terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh kaum pemuda dan mahasiswa dalam bentuk TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat). Terakhir di Masa Orde Baru sering terjadinya gejolak politik yang mengakibatkan seluruh pemuda melakukan sebuah gerakan baik secara politik maupun pemikiran. Berbagai peristiwa yang terjadi selama Masa Orde Baru para golongan muda selalu dihadapkan oleh paramiliter sebagai benteng utama Orde Baru. Hampir tidak mungkin para mahasiswa dan golongan muda menembus benteng pertahanan tersebut. Namun perjuangan mahasiswa telah mengalami masa puncaknya hingga Masa Reformasi dimana Mahasiswa berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah berjalan hampir tiga dasawarsa ([Ricklefs, 2008](#)).

Beberapa studi telah dilakukan terkait dengan topik ini. [Humaidi \(2010\)](#) mengkaji tentang respon partai-partai politik Islam di Masa Orde Baru terhadap kebijakan Soeharto yang saat itu dianggap sebagai upaya “deislamisasi” melalui kebijakannya. [Sabri \(2014\)](#) mendiskusikan membahas tentang relasi antara Cak Nur sebagai tokoh modernis Islam dengan HMI dalam perkembangan pemikir-pemikir Islam sekaligus kritikan Cak Nur terhadap Islam yang fundamentalis. [Makin \(2016\)](#) membahas tentang perkembangan Ideologi HMI dilihat dari aspek historis dan lebih mengarah pada pebentukan cara berpikir pragmatis.

Studi ini merupakan pengembangan dari studi-studi terdahulu dimana perbedaannya terletak pada relasi-relasi Islam dengan Negara yang sejak masa Orde

Baru memberikan tekanan secara politik hingga lahirnya Madzhab Ciputat sebagai kelompok yang mengupayakan perjuangan aspirasi politik melalui pendekatan yang moderat tanpa mengancam stabilitas politik Negara. Selain itu, penelitian ini lebih membahas pada aspek perkembangan pemikiran keislaman sebagai *impact* dari munculnya politik Azas Tunggal Pancasila di masa Orde Baru.

Penelitian ini dikaji berdasarkan keresahan dalam mengkaji mengenai munculnya era keemasan dalam sejarah pemikiran studi keislaman di Indonesia dengan mengkaitkan relevansi keadaan sekarang yang cenderung memiliki kemunduran kedinamikaan berpikir di kalangan akademisi dan cendekiawan Muslim. Akhirnya yang ditekankan pada pergerakan mahasiswa saat ini lebih mengutamakan cara berpikir pragmatis dan praktis tanpa diimbangi dengan hal-hal yang rasional terhadap kemajemukan dan realitas keislaman di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan menggunakan buku, jurnal, dan beberapa sumber internet yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini diperkuat dengan metode historis untuk melihat perkembangan pembelajaran sejarah di Indonesia dengan melihat peristiwa bersejarah di Indonesia. [Sjamsuddin \(2015\)](#) menyatakan bahwa metode historis diawali dengan tahapan pengumpulan data, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah sebagai kerangka berpikir dalam suatu penelitian yang sifatnya historis. [Ismaun et al. \(2016\)](#) menyatakan bahwa penelitian sejarah memiliki tahapan mulai dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Penggunaan metode historis ditekankan pada periodisasi waktu dikarenakan terdapat penekanan waktu dengan menjelaskan bagaimana proses munculnya gerakan pemikiran Madzhab Ciputat di masa Orde Baru hingga mengalami Masa Kemunduran saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Politik Azas Tunggal Pancasila Sebagai Tantangan Bagi Umat Islam

Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1967 tiga tahun setelah Gerakan 30 September 1965. Orde Baru telah meninggalkan jejak politik termasuk pada kebijakan yang mewajibkan seluruh organisasi atau paratai politik harus memiliki orientasi ke-Indonesiaan, kebijakan yang dimaksud adalah Kebijakan Azas Tunggal Pancasila. Keputusan penetapan kebijakan Azas Tunggal Pancasila berdasarkan UU. No. 3/1985 yang semua organisasi partai politik harus secara *legowo* menerima keputusan tersebut, jika tidak konsekuensinya harus dibubarkan. Pemerintah Orde Baru segera melakukan berbagai pendekatan dengan pimpinan organisasi muslim seperti NU dan Muhammadiyah untuk memberikan keyakinan tentang penerapan kebijakan tersebut. Menteri Agama Munawir Sjadzali dan Menko Polkam Surono

terlibat dalam sosialisasi tersebut. Munawir Sjadzali melakukan sosialisasi saat rapat dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) (Renhoard, 2019).

Menurut Munawir Sjadzali dalam Matanasi (2017) menyatakan bahwa penerapan konsep Azas Tunggal Pancasila sama halnya dengan prinsip demokrasi yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Piagam Madinah. Tentu apa yang ditafsirkan oleh pemerintah Orde Baru merupakan sebagai upaya untuk mendapatkan suara dari kalangan muslim. Banyak organisasi yang mendukung penerapan Azas Tunggal Pancasila namun tidak sedikit yang menolak penerapan tersebut. Seperti yang menimpa organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia) pimpinan Delia Noer, Sjarifuddin Prawira Negara, dan A.M. Fatwa menolak dengan keras kebijakan tersebut yang berujung pada dibubarkannya PII.

HMI secara organisasi mendukung penuh kebijakan tersebut akan tetapi diantara kader satu dengan lainnya saling berseteru mengenai arah kelanjutan dari HMI. Tahun 1986 terpecahlah HMI dengan HMI DIPO dan MPO. HMI MPO (Majelis Penyelamatan Organisasi) tetap menjalankan idealismenya sebagai organisasi Islam seperti apa yang dicita-citakan oleh Lafran Pane pendiri HMI. Ketika mengadakan kongres di Padang HMI DIPO memberikan pernyataan bahwa mereka telah menerima Azas Tunggal Pancasila juga karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru. Setelah penerimaan azas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. HMI MPO menolak keras dengan hasil rapat kongres di Padang terkait penerimaan Azas Tunggal Pancasila maka HMI MPO mendirikan formatur kepengurusan baru dengan menjadikan M. Saleh Khalid sebagai ketua pertama dari MPO (Khotimah, 2009).

Menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, Soeharto berusaha untuk menjaga jarak dengan Soedjono Hoemardani selaku mitra dalam hal masalah kejawaen. Kemudian, beberapa hari setelah Soedjono Hoemardani meninggal, Soeharto menunaikan ibadah haji. Kalangan anti terhadap Soeharto mengatakan keberangkatan Soeharto ke Mekkah dalam rangka ibadah haji sebagai permainan politik (Wanandi, 2014). Sepulangnya dari ibadah haji, Soeharto segera melakukan manuver politik baru dengan memanggil seluruh cendekiawan Muslim untuk membentuk ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Soeharto kemudian merestui Habibie menjadi ketua ICMI pertama. Ketika ICMI akan mengadakan simposium pertama pada 28 Desember 1990 di Surabaya, empat hari menjelang acara, aparat keamanan menyoal pembentukan organisasi tersebut. ICMI, menurut Pemda Surabaya harus diwaspadai bahkan selama kegiatan tersebut berlangsung dijaga dengan ketat oleh aparat keamanan. Tapi Abdul Aziz Hosein yang saat itu sebagai penyelenggara acara mengatakan bagaimanapun ICMI akan terbentuk karena presiden sudah menyetujui dan AD/ART-nya sudah disusun.

Lebih dari itu, implikasi dari pemikiran tersebut ternyata telah merubah kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam tahun 1991. Pemerintah Orde Baru menjelang akhir kekuasaannya agak melunak terhadap resistensi dan kritikan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, mahasiswa, dan organisasi muslim lainnya. Soeharto telah melakukan banyak perubahan dalam kebijakannya yang semula melarang umat muslim menggunakan 'identitas' kemudian diperbolehkan kembali umat Islam dalam menjalankan aktifitas perpolitikannya Sebagai bentuk akomodatif sebagai kebijakan Orde Baru menjelang akhir kekuasaannya dapat terlihat dalam empat bidang yaitu akomodasi struktural, legislatif, infrastrukural, dan kultural. Dalam bidang struktural, bentuk akomodasi yang paling mencolok adalah direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislatif negara. Adapun akomodasi legislatif dapat dilihat dari produk undang-undang atau peraturan yang agak "berpihak" kepada Islam. Sementara akomodasi infrastrukural adalah dibangunnya beberapa bangunan sebagai "proyek keagamaan" dan adanya pengakuan pemerintah terhadap keberadaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Terakhir, akomodasi kultural dimana para pejabat sudah mulai memakai idiom-idiom Islam dalam acara kenegaraan (Aminudin, 1999; Thaba, 1996).

B. Tonggak Awal Diperkenalkannya Islam Madzhab Ciputat

Pada tahun 1957 Kementerian Agama mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Ciputat. Tujuan awal didirikannya ADIA adalah untuk menghasilkan tenaga keagamaan yang nantinya akan dipekerjakan di Kementerian Agama. ADIA kemudian dileburkan menjadi IAIN pada tahun 1960. Peleburan menjadi IAIN membuat status ADIA menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam) dan sudah tidak terikat dengan kedinasan serta menjadikan IAIN Jakarta sebagai universitas setingkat perguruan tinggi. IAIN Jakarta pada tahun 1963 mendirikan dua fakultas baru, yakni Adab dan Humaniora sebagai upaya untuk mensinkronisasikan antara pendidikan berbasis agama dengan berbasis ilmiah.

Seiring dengan didirikannya fakultas baru di IAIN Jakarta, organisasi keislaman tumbuh subur di dalamnya seperti HMI dan PMII. HMI yang berbasis kemoderatnya sedangkan PMII berbasis keislamannya. Satisman yang saat itu menjadi Menteri Agama pada masa Kabinet Hatta mengungkapkan bahwa lembaga perguruan Islam memiliki peran penting dalam mencetak intelektual muslim sekaligus sebagai upaya kooperatif dalam menjalankan aktifitas politik untuk meraih hati simpatisan umat Islam dalam berpolitik (Madjid et al., 1999).

Selama periode 1960-1970 menjadi awal kemunduran umat Islam seiring dengan gejolak politik yang mempengaruhi suara umat Islam dalam berpolitik juga diberlakukannya Azas Tunggal Pancasila pada Masa Awal Orde Baru. Namun ketika terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan

tuntutan Tritura yang mana didalamnya terdapat kepentingan Militer dan Orde Baru seluruh mahasiswa dikerahkan termasuk mahasiswa dari IAIN Jakarta untuk melakukan protes terhadap Soekarno. Tidak terkecuali HMI yang ikut terlibat, seperti Akbar Tanjung kala itu dengan terang-terang menentang politik Orde Lama (Firahman, 2010).

Namun secara kelembagaan, kurikulum yang diajarkan di IAIN Jakarta masih sangat dikotomis (hanya pada pembelajaran yang berbasis Agama). Menteri Agama memandang IAIN tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan Hatta dan Satisman. Metode pembelajaran yang diajarkan juga sangat sederhana dengan metode pembelajaran yang sifatnya satu arah. Penggunaan kitab-kitab klasik menjadi referensi utama dalam pembelajaran yang diterapkan. Tahun 1971 Mukti Ali sempat membubarkan IAIN dengan alasan yang telah disebutkan, namun IAIN kembali bangkit dari keterpurukan dan melakukan rombakan secara besar-besaran terutama berkenaan dengan pola pendidikan yang diterapkan. Dari sejak itulah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali kepada khithah awal berdirinya, dan hingga sekarang Islam yang diajarkannya di Perguruan Tinggi telah membentuk semacam Islam mazhab Ciputat. Perkembangan Mazhab Ciputat telah mengalami masa kejayaan pada tahun 1979-1987 ketika munculnya beberapa intelektual muslim dari kalangan IAIN. Nurcholis Madjid menjadi tokoh utama dalam perkembangan aliran ini (Putra, 2008).

C. Karakteristik Islam Madzhab Ciputat

Islam mazhab Ciputat ingin tetap berada pada karakter Islam yang original sebagaimana yang dijumpai dalam al-Qur'an. Islam yang berpegang teguh pada spirit wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah, yaitu tentang ajaran yang mengajarkan spirit keislaman terkait agama, amal, dan sikap. Seluruh komponen apabila dapat dijalankan dengan baik maka akan mencapai titik *mak'rifatullah* (puncak tertinggi pada ketauhidan). Sehingga hal inilah yang menjadi acuan penting bagi apa yang telah dicita-citakan dalam pandangan Islam Madzhab Ciputat (Madjid, 1997). Namun dibutuhkan perkembangan ilmu dan teknologi sebagai pendukung dalam penerapan ajaran tersebut.

Madzhab Ciputat dikenal sebagai ajaran yang menghargai akal sebagai anugerah Tuhan yang harus digunakan secara maksimal, bersikap terbuka (inklusif), moderat, toleran, rasional (mencari makna dan hikmah, serta faktor-faktor yang bisa diterima akal) atas sebuah ajaran atau fenomena sosial, memahami *sunnatullah* sebagai takdir Tuhan yang tidak dapat diubah. Namun dalam waktu bersamaan, manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi (berikhtiar) dalam batas-batas *sunnatullah* (takdir) tersebut, dan tidak memilih paham takdir yang membawa akibat sikap fatalistik, *jumud*, beku, pasrah dan menyerah, mengandalkan Tuhan tanpa usaha, sebagaimana yang dijumpai dalam masyarakat Islam tradisional, berbicara

berdasar data (berbasis *research*), menghargai pendapat orang lain, dan memandang mazhab sebagai kumpulan hasil olah pikir (ijtihad) yang tidak pernah final, dan karenanya dapat diperbaharui setiap saat. Karakter berfikir keislaman yang utuh, komprehensif dan integrated dari berbagai sudut pendekatan (*multi approaches*): normatif, teologis, spiritual, moral, sosiologis, antropologis, historis, filosof, kultural, dan sebagainya. Islam yang seperti itulah yang nampaknya dianut oleh Islam mazhab Ciputat, Islam yang menampilkan wajah yang utuh, komprehensif, holistik, dan integratif dari ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah (Bruinessen, 1996).

Prinsip dari ajaran Madzhab Ciputat yakni berusaha untuk mengintegrasikan antara pengetahuan secara agama dan pengetahuan secara duniawi yang sudah mencakup sains dan teknologi. Seyogyanya, kedua unsur tersebut haruslah saling terintegrasi satu sama lain. Islam haruslah dipandang sebagai pedoman hidup tanpa memandang secara kontekstual. Islam mampu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dijadikan referensi terhadap tindakan yang dilakukan oleh umat terdahulu. Pemanfaatan ilmu pengetahuan juga dipakai dalam memahami, menginterpretasikan, dan mengkritik terhadap berbagai pandangan ulama karena sejatinya para ulama tersebut hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahpahaman. Selama kritik tersebut tidak menyangkut esensi atau isi Al-Quran dan Al-Hadis, kritik dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya salah satunya dengan memodernisasikan cara berpikir dalam memahami Islam. Islam sejatinya tidak pernah menyusahkan para pengikutnya namun yang dibikin susah adalah pemikiran atau penafsiran yang salah yang dilakukan oleh beberapa oknum dalam memahami Islam sehingga terjerumus pada pemikiran yang sesat hingga berujung pada tindakan terorisme sebagai pola pemikiran yang salah. Inilah yang menjadi kekhawatiran dan sering terjadi di beberapa kampus apabila tidak dilakukan penyaringan terhadap ajaran yang masuk dan berdampak fatal bagi para mahasiswa. Dimasa awal perkembangan madzhab ini sangat disenangi oleh kalangan muda yang menganggap sebagai bentuk keprogresifan dalam perkembangan pemikiran intelektual muslim di Indonesia (Madjid et al., 1999).

D. Perpaduan Wahyu dan Akal sebagai Titik Tolak Pemikiran Islam Mazhab Ciputat

Islam Mazhab Ciputat merupakan salah satu kelompok pemikiran ilmu keislaman yang cukup berpengaruh di Indonesia. Mazhab Ciputat merupakan kelompok yang dalam perkembangannya mengedepankan perpaduan wahyu dan akal sebagai basis pedoman dalam hidup beragama. Keduanya merupakan unsur yang saling melengkapi dalam Islam .

Manusia merupakan makhluk Allah Swt yang diciptakan berbekal akal pikiran. Akal menjadi faktor pembeda antara manusia dan makhluk lain-Nya. Potensi akal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas.

Sumber utama ajaran Islam selain dari kitab suci adalah akal manusia (Nasution, 2006). Akal memiliki kedudukan tinggi sehingga Islam menjadi agama yang rasional (Sumitro, Kholish, & Mushoffa, 2014).

Meski demikian akal tidak bekerja sendiri dalam memahami ayat-ayat Allah Swt, baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat. Para pemikir besar Islam lahir dari proses aktualisasi akal pikiran. Beberapa diantaranya seperti Al-Farabi, Ibn Miskawaih, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Al-Kindi, Ibnu Tufail dan lain-lain, memiliki pandangan yang luas, terbuka dan rasional hingga menghantarkan Islam pada masa keemasan. Namun, di samping itu, kejumudan dalam berpikir, sikap tidak mau menggunakan akal dalam proses beragama menjadi titik awal bagaimana Islam mengalami kemunduran (Nasution, 2014).

Gagasan Nasution tentang perpaduan wahyu dan akal menjadi landasan bagaimana kehidupan keislaman di Indonesia di masa depan dibangun. Menurutnya keislaman yang berkembang di Indonesia cenderung fatalis. Islam di Indonesia menurutnya condong kepada pemikiran asy'ariyah yang lebih kaku dan Nasution lebih sepatutnya terhadap pemikiran rasional mu'tazilah. Pemikiran rasional dan filosofis yang tidak begitu saja menerima dogma keagamaan yang berlaku (Sumitro et al., 2014).

Nasution (2006) mempergunakan akal adalah salah satu dasar dalam beragama Islam. Iman seseorang tidak akan sempurna jika tidak didasarkan pada akal. Ia meyakini potensi akal harus dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan umat Islam yang terwujud dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan modern yang berdasar kepada *sunnatullah*, tidak bertentangan dengan Islam. Keduanya bersumber dari Allah. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan, demikian pula sebaliknya. Ia meyakini, Al-Quran sebagai wahyu Allah memandang akal sebagai sesuatu yang sangat penting. Perpaduan tersebut mampu membawa masyarakat menjauh dari kekacauan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini tidak lain merupakan hasil daya pikir manusia, suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan perkembangan tersebut tidak selamanya membangun dampak positif bagi kehidupan manusia. Kemajuan yang dihasilkan oleh daya pikir manusia justru melahirkan masalah-masalah baru yang mengancam kehidupan. Diciptakannya bermacam bentuk senjata pemusnah misal merupakan salah satu contoh kecil dari hasil daya pikir manusia. Demikian pula sistem informasi seperti internet, selain membawa pengaruh positif bagi kehidupan manusia juga mengancam moralitas generasi muda.

Dengan demikian, keberadaan akal sebagai sumber lahirnya pemikiran manusia haruslah difungsikan sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah Swt, sehingga dalam berfikir akal tidak menjadi liar, bebas, dan menyesatkan. Kedudukan akal merupakan ujung tombak dan sarana yang dapat mengantarkan manusia kepada

kemaslahatan atau bahkan kemudharatan. Penggunaan akal dalam setiap permasalahan dan keadaan adalah suatu keniscayaan. Allah Swt, mengingatkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 100.

“dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya”.

E. Membongkar Kejumudan Berfikir

Salah satu sikap kebanyakan umat Islam di Indonesia adalah kejumudan dalam berpikir. Sebagaimana Nasution, Nurcholish Madjid (Cak Nur) merupakan salah satu tokoh yang mengedepankan kombinasi antara wahyu dan akal. Ia merupakan salah satu tokoh yang berkontribusi besar dalam pemikiran yang dikembangkan Islam Mazhab Ciputat. Jika Nasution bertindak sebagai pemupuk pondasi generasi awal dalam pembaharu pemikiran Islam, maka Madjid menjadi tokoh yang meneruskan tradisi berpikir tersebut (Winters, 1999).

Ide-ide Cak Nur terbagi kedalam enam aspek, yakni. (1) melawan teokrasi, (2) mempromosikan demokrasi, (3) mengembangkan ide-ide kesetaraan gender, (4) pluralisme, (5) kebebasan berekspresi, dan (6) mendukung gagasan kemajuan. Gagasan tradisionalisme Islam yang dikombinasikan dengan modernisme Islam menjadi pijakan Cak Nur dalam berkontribusi dalam pemikiran keislaman. Cak Nur menyebutnya sebagai Neo-Modernisme. Cak Nur sebagai pemikir Islam mencoba mengktitik perkembangan keagamaan, khususnya Islam, yang tidak responsif terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Agama yang seharusnya hadir sebagai solusi untuk masalah-masalah tersebut, justru menjadi biang keladi dari masalah itu sendiri (Riza, 2017). Salah satunya disampaikan Cak Nur sendiri dalam pidato yang di sampaikan di Taman Ismail Marzuki tahun 1992.

“... apakah ada kebaikan di dalam kehidupan beragama di masa yang akan datang? Agama itu mengajak kebaikan, tapi justru ketika orang percaya kepada agamanya. Maka, dia semakin kental menganggap dirinya benar untuk menganiaya orang lain. Tentu harus dicari pemecahan, karena Indonesia akan menghadapi masalah ini. Dan salah satu yang bisa kita gunakan dalam menghadapi persoalan ini ialah mencoba memahami agama secara lebih baik yang dan lebih benar...”

Pidato tersebut setidaknya mengusik kondisi keagamaan kala itu. Cak Nur melakukan hentakan luar biasa untuk mengingatkan umat beragama. Ia melihat dari posisi yang berbeda disaat para pemimpin muslim lain yang hanya fokus pada masalah integrasi umat. Cak Nur justru melihat persoalan umat islam di Indonesia bukan terletak pada persoalan disintegrasi. Ia melihat bahwa persoalan nyata yang dihadapi oleh umat Islam adalah kejumudan dalam berpikir.

Hal senada disampaikan pendahulunya. [Nasution \(2014\)](#) menganggap bahwa mayoritas umat Islam tidak memaksimalkan potensi akal nya. Mereka lebih memercayai apa yang disampaikan ulama-ulama kala itu. Nasution sangat tidak tertarik kepada praktik seperti itu. Menurut nya, praktik tersebut menimbulkan paham *taklid* buta di kalangan umat dan menyebabkan umat berhenti menggunakan akal nya.

Tuduhan-tuduhan, utamanya terhadap Cak Nur, terus berdatangan. Sementara itu, Yudi Latif menganggap bahwa tuduhan-tuduhan tersebut sebagai akibat tidak sungguh membaca karya Cak Nur. Mereka tidak sungguh-sungguh mencermati pikiran-pikirannya. Tapi yang mereka lakukan adalah suatu pewarisan penuturan secara berantai dengan segala distorsi-distorsinya. Sehingga, yang terjadi pada akhirnya adalah mispersepsi terhadap gagasan utama Cak Nur itu sendiri. Sebagai pemikir garda terdepan Cak Nur tidak terlalu mengkompromikan pikiran visionernya terhadap hal tersebut. Ia terus bergerak dalam pengembangan gagasan Islam yang baru ([Riza, 2017](#)).

Baik Harun Nasution, Cak Nur maupun Mazhab Ciputat secara umum pada dasarnya bergerak untuk mendobrak praktik kejumudan berpikir yang banyak dilakoni umat Islam. Walaupun dalam pelaksanaannya tak jarang dianggap sebagai heresi, sesuatu yang menyimpang dari agama, tapi mereka tidak berhenti dalam usahanya mengembangkan pemikiran keilmuan keislaman di Indonesia. Kombinasi antara keilmuan keagamaan, Al-Quran, hadist dan lainnya, dengan ilmu-ilmu kontemporer menjadi jembatan dalam tumbuh kembang pemikiran keislaman di Indonesia. Sejarah, mencatat bahwa Harun Nasution, Cak Nur dan Mazhab Ciputat hadir sebagai lokomotif pembawa perubahan pemikiran Islam di Indonesia ([Bruinessen, 1996](#)).

F. Relevansi Madzhab Ciputat-HMI Sebagai Identitas Keislaman Baru

Islam Madzhab Ciputat sangat diidentikkan dengan Himpunan Mahasiswa Islam dari Mahasiswa IAIN Jakarta (sekarang menjadi UIN). Keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dikarenakan para pengagas gerakan pemikiran Islam Madzhab Ciputat merupakan kader dari HMI. HMI dengan Madzhab Ciputat pada dasarnya sama-sama menginginkan untuk terwujudnya Islam yang moderat. Semenjak kemunculan Nurcholis Madjid menjadikan sebuah inspirasi bagi HMI dalam menentukan pola ideologisasi yang ke arah universal. Artinya HMI memiliki orientasi bahwa Islam yang dianut adalah *Islam rahmatan lil al-amin*, Islam yang merdeka tanpa kelompok tertentu dan setiap kader yang hendak bergabung menjadi HMI tidak dipandang berdasarkan aliran atau pengikut dari imam tertentu. Hubungan HMI dengan Madzhab Ciputat saat ini seakan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya karena tak sedikit juga di HMI yang tak sejalan dengan gagasan-gagasan pembaruan yang dilakukan oleh Cak Nur ([Sabri, 2014](#)). Kedua elemen tersebut sama-sama memperjuangkan gerakan pembaruan-Islam di Indonesia meskipun

dengan cara yang berbeda. Kelompok ini dikenal dengan kelompok neomodernis dan kelompok substansialis.

Kelompok neomodernis dinisbatkan karena telah memperbarui kalangan modernis-muslim yang menggelontorkan gagasan modernisasi-Islam. Kelompok neomodernis, terbentuk karena mereka tak hanya punya akses dalam khasanah tradisi intelektual Barat-modern. Namun, juga punya akses yang cukup luas dari khasanah tradisi klasik-pesantren. Kelompok substansialis, punya akses besar terhadap khasanah intelektual Barat-modern, tapi kurang mendapatkan akses khasanah intelektual klasik-Islam. Kelompok neomodernis diwakili oleh orang seperti Cak Nur sendiri, kemudian Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Yang mewakili kelompok substansialis adalah M. Dawam Rahardjo, Adi Sasono, dan lain-lain. Kemunculan kelompok ini membawa arah baru dalam perkembangan tradisi keilmuan keislaman dan gerakan pemikiran Islam di Indonesia (Sabri, 2014).

HMI memang telah didirikan di Jogja pada tahun 1946 namun seluruh aktifitas HMI terpusat di IAIN Jakarta terlebih saat itu Harun Nasution sebagai rektor pada tahun 1973 mengizinkan beberapa organisasi ekstra untuk menjaring kader di lingkungan kampus. Nasution selama menjadi rektor dianggap oleh para mahasiswanya sebagai sosok yang merdeka dengan memberikan akses sebesar-besarnya kepada mahasiswa dalam berdinamika dan berintelektual (Surahman, 2010). Hal inilah yang kemudian menginspirasi sosok Azyumardi Azra sebagai mantan mahasiswanya yang pada tahun 2012 menjadi rektor UIN Jakarta. Dimasa kepemimpinan Azra menyetujui pendirian *Student Government* (SG) yang diusulkan elemen-elemen mahasiswa di UIN sebagai pengejawantahan reformasi di dalam kampus. Salah satu yang mengusulkan adalah TB Ace Hasan Syadzily (kini Wakil Ketua Komisi VIII DPR) yang akhirnya menjadi presiden BEM UIN pertama versi SG. Azra mengungkapkan bahwa pokok dari pendidikan Islam adalah pendidikan yang demokratis, pendidikan yang moderat, dan pendidikan yang berorientasi pada kemerdekaan kodrat manusia.

G. HMI Dengan Orientasi Keindonesiaan

Pergolakan pemikiran di kalangan kader HMI telah berdampak pada banyak persoalan terutama bidang agama, dan politik yang hingga kini masih terus diperdebatkan di kalangan kader HMI (Sitompul, 1986). Mengingat sifat dari kader-kader HMI cenderung heterogen tidak seperti organisasi ekstra lainnya seperti PMII, dan KAMMI yang memiliki dasar orientasi yang jelas. Kader HMI dituntut untuk memiliki kebebasan dalam berpikir sebagaimana yang dicetuskan oleh Nurcholis Madjid ketika masih menjadi kader HMI. Cak Nur kemudian merumuskan NDP (Nilai Dasar Perjuangan). NDP merupakan gambaran apabila seseorang telah menjadi HMI dianggap memahami Islam sebagaimana tercantum dalam al-Quran. Secara doktrin, yang terkandung dalam NDP bukanlah ajaran yang bertentangan

dengan Islam, melainkan merupakan formulasi kembali atas al-Quran sehingga tertuang menjadi suatu kepribadian bagi kader HMI dalam mewujudkan amanat Tuhan sebagai *khalifah fil-ardhi* (Wekke, Sitompul, & Afkari, 2016).

Organisasi HMI memang sejak dibentuk bukanlah sebuah organisasi politik akan tetapi yang diterapkan dalam NDP mengajarkan tentang perjuangan kebenaran dan kemanusiaan yang menjadi landasan kuat dalam HMI. Karakteristik khas pola gerakan HMI sejak awal berdirinya adalah tidak memisahkan gerakan politik dengan gerakan keagamaan. Berpolitik dalam HMI adalah merupakan suatu keharusan, sebab untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan HMI haruslah dilakukan secara politis. Hal ini dikuatkan pula oleh pendiri HMI, Lafran Pane, bahwa bidang politik tidak akan mungkin dipisahkan dari HMI, sebab itu sudah merupakan watak asli HMI semenjak lahir. Namun hal itu bukan berarti HMI menjadi organisasi politik, sebab HMI lahir sebagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (ormas), yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan teologisnya, kampus sebagai wahana aktivitasnya, mahasiswa Islam sebagai anggotanya. Sedangkan kampus memiliki background kuat dalam menjawab berbagai persoalan dan kedinamikaan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga mahasiswa dituntut untuk menjadi *agent of change* atau agen perubahan bagi masyarakat yang akan mewarnai kancah perpolitikan di Indonesia meskipun berada dari luar pemerintahan. Mahasiswa memiliki tugas untuk selalu mengkritik pemerintah karena menjadi tugas utama mahasiswa disamping tuntutan akademik yang dijalaninya (Arrozy, 2013).

Pada dasarnya Islam Madzhab Ciputat merupakan suatu gerakan pemikiran yang berusaha menyelaraskan antara doktrin keislaman dengan pembaharuan pemikiran terkait pemahaman Islam yang selama ini dianggap sebagai cara pandang yang kolot. Islam Madzhab Ciputat sering dikaitkan oleh Islam Liberal, namun Nurcholis Madjid menentang keras tentang ideologi Islam Liberal. Perbedaan yang mendasar antara Islam Liberal dengan Liberalisasi dalam Islam menurut Cak Nur yakni terletak pada gagasan dan proses pencarian terkait masalah keislaman yang sifatnya kontekstual. Gagasan Islam Madzhab Ciputat kemudian diikuti oleh HMI sebagai pendukung dalam mewujudkan gagasan Islam namun memiliki wawasan ke-Indonesiaan dengan menerbitkan sebuah buku NDP (Nilai Dasar Perjuangan) yang saat ini menjadi buku wajib dalam menjalankan aktifitas kegiatan HMI. Warisan yang telah ditinggal oleh Cak Nur kemudian para mantan pengikutnya meneruskan organisasi yang bergerak pada pendidikan dan kajian ke-Islaman yang sebelumnya telah didirikan oleh Cak Nur yakni Yayasan Paramadina dan didirikannya Nurcholis Madjid Society oleh mantan pengikutnya (Arrozy, 2013).

H. Kemunduran Islam Madzhab Ciputat dan HMI

Semenjak wafatnya Nurcholis Madjid pada tahun 2005, Islam Madzhab Ciputat mengalami fase kemunduran hingga sekarang. Namun semasa hidupnya Cak

Nur sering dianggap sebagai bagian dari Islam Liberal oleh masyarakat yang berstigma negatif. Bagi Cak Nur dalam mencapai proses liberalisasi dalam Islam hanya menekankan pada cara berpikir dalam proses pencarian jati diri tentang keislaman (Wahid, 2007). Cara pandang Cak Nur kemudian diikuti oleh Ulil Abshar Abdallah namun cara yang dilakukan dalam meliberalisasi Islam sangat ekstrim ketimbang Cak Nur. Ulil bahkan menyentuh pada persoalan akidah, sebagai contoh memperbolehkan seluruh mahasiswa UIN untuk tidak memakai hijab (Hakim, 2017).

Kemunduran juga dirasakan bagi HMI. Saat ini HMI dikenal sebagai organisasi yang memiliki tiga aliran pergerakan yakni pertama aliran Akbar Tanjung, aliran Cak Nur, dan aliran Munir Said Thalib. Ketiga aliran tersebut memiliki orientasi yang berbeda yakni aliran politik praktis, aliran intelektual, dan aliran pejuang kebebasan. Mayoritas kader HMI lebih memilih kepada aliran Akbar Tanjung, dikarenakan apa yang diwariskan oleh Akbar Tanjung kepada para kader HMI dianggap sangat menjanjikan dan sebagai 'politik tengah'. Alih-alih mengikuti aliran Cak Nur yang berbasis pada intelektualisme dan dialektika; dan Munir yang dianggap kurang begitu dihargai oleh sesama kader HMI. Inilah kemudian yang menjadikan kritik terhadap perkembangan HMI saat ini. Seolah organisasi Islam termasuk HMI hanya menjadi arena pertarungan kelompok untuk mencapai kekuatan dari politik praktis dan pragmatis yang tidak lagi mementingkan esensi dan substansi organisasi himpunan serta seakan dijauhkan dari aktivitas sosial bermasyarakat. Konflik ditubuh HMI hanya dapat dihantarkan pada aktivitas yang kontra-produktif, tak rasional dan cenderung bersifat doktriner. Maka merupakan sebagai kritik dari perkembangan organisasi Islam di kalangan mahasiswa akademisi yang hanya terlalu mengedepankan politik praktis tanpa mampu memikirkan kembali reorientasi tentang keislaman (Husaini, 2015).

KESIMPULAN

Madzhab Ciputat berusaha untuk menyelaraskan antara konsep keislaman dengan konsep Negara yang selama ini selalu dibenturkan. Madzhab Ciputat lahir dari kalangan akademisi sehingga menjadi suatu tradisi keilmuan baru terhadap perkembangan pemikiran keislaman. Namun beberapa kalangan menyebutkan bahwa Madzhab Ciputat sebagai usaha untuk meliberalisasikan Islam sehingga mendapat sentimen negatif di kalangan masyarakat. Madzhab ini terafiliasi dengan HMI. Kemunduran Madzhab Ciputat dikarenakan tidak ada lagi yang meneruskan tradisi keilmuan keislaman di kalangan HMI. Hal inilah yang kemudian menjadi kritikan terhadap pola organisasi HMI yang hanya mementingkan cara berpikir praktis dan pragmatis daripada melakukan kajian-kajian ilmiah dengan meneruskan tradisi yang telah dilakukan oleh para cendekiawan muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin. (1999). *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia: Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arrozy, A. (2013). *Antara Jakarta dan Yogyakarta : Gerakan Mahasiswa Islam Pada Masa Orde Baru*. Universitas Gadjah Mada.
- Bourchier, D. (2014). *Illiberal Democracy in Indonesia: The ideology of the family state*. <https://doi.org/10.4324/9780203379721>
- Bruinessen, M. Van. (1996). Islamic State or State Islam? Fifty Years of State-Islam Relations in Indonesia. In *Jahrhunderts* (hal. 19–34). Hamburg: Abera-Verlag.
- Chambert-Loir, H. (2011). *Sultan, Pahlawan dan Hakim*. Jakarta: KPG Gramedia.
- Firahman, A. (2010). *Kongres HMI Ke-VIII Tahun 1966 di Surakarta pada Masa Transisi Pemerintahan di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Gayatri, S. Indera, Shalfiyanti, Amurwani, Dewi, P., Purba, L., Herliswany, ... Supardianik, L. (2009). *Sejarah Pemikiran Indonesia III (Lanjutan) 1967-1998*. Jakarta: Direktorat Sejarah Kemendikbud.
- Hakim, L. (2017). Azyumardi Azra Sebagai Sejarawan Islam. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora*, 21(2), 11–28. <https://doi.org/10.15548/tabuah.v21i2.64>
- Humaidi, Z. (2010). Islam dan Pancasila: Pergulatan Islam dan Negara Periode Kebijakan Asas Tunggal. *Kontekstualita*, 25(2), 291–312.
- Husaini, A. (2015). *Liberalisasi Islam di Indonesia: Fakta, Gagasan, Kritik, dan Solusinya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ismaun, Winarti, M., & Darmawan, W. (2016). *Pengantar Ilmu Sejarah Pendidikan Sejarah*. Bandung: Asosiasi Pendidikan dan Peneliti Sejarah.
- Khotimah. (2009). Pola Pemahaman Keagamaan HMI DIPO, HMI MPO, KAMMI UIN Suska Riau Terhadap Kesadaran Pluralitas. *Toleransi*, 1(1), 78–100.
- Madjid, N. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, N., Azra, A., Hidayat, K., Ali, F., Noer, K. A., Rachman, B. M., ... Sahal, A. (1999). *Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat*. Bandung: Zaman.
- Makin, A. (2016). Revisiting the Spirit of Religious Nationalism in the Era of Pluralism and Globalization: Reading the Text of NDP of HMI. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(2), 285–310.
- Matanasi, P. (2017). Siapa menolak Pancasila sebagai Azas Tunggal. Diambil 4 Maret 2020, dari Tirto.id website: <https://tirto.id/siapa-menolak-pancasila-sebagai-asas-tunggal-coki>
- Nasution, H. (2006). *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press.
- Nasution, H. (2014). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bintang Bulan.
- Putra, O. E. (2008). Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru. *Jurnal Dakwah UIN Sunan Kalijaga*, 9(2), 185–201.
- Renhoard, J. M. (2019). Politik Identitas Era Orde Baru di Indonesia Memasuki Era Reformasi. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 6(1), 115–131.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu

Semesta.

- Riza, R. (2017). Nurcholish Madjid Maestro Indonesia. Diambil dari Channel YouTube Pembangunan Jaya website: <https://youtu.be/cdC9hDeKKik>
- Sabri, M. (2014). HMI, Cak Nur dan Gelombang Intelektualisme Islam Indonesia Jilid 2. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(2), 317–334.
- Sitompul, A. (1986). *Pemikiran HMI dan Relevansinya dengan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Integrita Dinamika Press.
- Sjamsuddin, H. (2015). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sumitro, W., Kholish, M. A., & Mushoffa, I. (2014). *Konfigurasi Fiqih Poligini Kontemporer: Kritik Terhadap Paham Ortodoksi Perkawinan Poligini di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Surahman, S. (2010). Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Nadjid. *Jurnal Dakwah*, XI(2), 127–138.
- Thaba, A. A. (1996). *Islam dan negara dalam politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahid, A. (2007). *Islam Liberal dan Dunderamental: Sebuah Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: ELSAQ Press.
- Wanandi, J. (2014). *Menyibak Tabir Orde Baru*. Jakarta: Kompas.
- Wekke, I. S., Sitompul, A., & Afkari, R. (2016). Gerakan Himpunan Mahasiswa Islam dalam Pemikiran dan Dakwah di Indonesia. *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, 1(2), 167–184. <https://doi.org/10.2121/incita-jisisea.v1i2.759>
- Winters, J. A. (1999). *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Djembatan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
